



Kasus Korupsi Proyek Hambalang

Marzuki Bantah 15 Inisial Anggota DPR

JAKARTA, TRIBUN - Ketua DPR Marzuki Alie perlu menemui Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Istana, menyusul beredarnya dua versi audit investigatif tahap II BPK terhadap proyek Hambalang. Komisi X menyebut tak ada inisial nama pada hasil audit yang diserahkan ke DPR. Namun keterangan itu berbeda dengan pernyataan KPK yang menyebut ada 15 inisial nama anggota DPR yang diduga memuluskan proyek Hambalang secara melawan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Para anggota Komisi X itu menyetujui alokasi anggaran dan program Kemppora pada APBN-P 2010 senilai Rp 600 miliar, dan APBN 2011 senilai Rp 920 miliar, sebelum dibahas dalam Raker Komisi X dan Kemenpora.

Setelah bertemu Ketua BPK Hadi Purnomo, Marzuki memberi penjelasan atas alasan "hilangnya" nama anggota DPR tersebut. "Saya baru ketemu Pak Hadi Purnomo tadi (kemarin) di Istana. Saya minta izin ke beliau untuk menyam-

paikan," kata Marzuki di Gedung DPR Jakarta, Jumat (30/8).

"Kata beliau, silakan disampaikan. Jadi, nama-nama yang 15 anggota DPR itu ada di kertas kerja pemeriksaan, bukan di laporan, karena nama-nama ini tak tersangkut, maka tak muncul di LHP," jelasnya.

Berdasarkan keterangan yang didapatnya dari Hadi, Marzuki mengatakan inisial nama-nama yang muncul di audit BPK (termasuk Juhaimi Alie) yang diserahkan ke DPR adalah mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Tak ada inisial nama anggota DPR di laporan itu.

"Jadi ke 15 nama itu memang dipanggil untuk diklarifikasi. Jadi nama-namanya hanya ada di kertas pemeriksaan. Justru malah bukan 15, tapi 30 anggota DPR yang dipanggil. Tapi itu bukan orang yang terlibat," tuturnya.

"Kata Pak Hadi Purnomo, bahwa dalam pemeriksaan itu ada kertas kerja, kertas kerja itu tak harus masuk ke LHP,"

kata politikus asal Sumatera Selatan itu.

Seiring penjelasan Marzuki, Badan Kehormatan (BK) DPR mempertanyakan audit Hambalang tahap II yang belum diberikan oleh pimpinan DPR. BK memerlukan hasil audit itu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan belasan anggota DPR. "Kami mau yang resmi, yang diterima pimpinan DPR. Kenapa nggak diberikan dari Pak Marzuki," kata Ketua BK Trimedya Panjaitan.

Apalagi, kata Trimedya, saat ini telah beredar dua versi audit Hambalang yang beredar di kalangan wartawan. Politisi PDIP itu mengaku kesulitan mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan 15 anggota DPR.

"Ini kami Badan Kehormatan, institusi juga. Mudah-mudahan diberikan," harap Trimedya. Ia berjanji, apabila mendapatkan audit tersebut segera ditindaklanjuti, termasuk apa peran anggota DPR dalam kasus tersebut. "Pekan depan kepastian dari pimpinan DPR," tuturnya. (tribunnews/fer/det)